



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

- Rapat ke : 30 (*tiga puluh*)
Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Danareksa (Persero).
- Hari, Tanggal : Rabu, 19 Februari 2020
Pukul : 14.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- A c a r a : 1. Perkenalan;
2. Pembahasan isu aktual di masing-masing BUMN, dan
3. Lain-lain.
- Hadir : 1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI;
2. Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
3. Direksi Perum Jaminan Kredit Indonesia;
4. Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
5. Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero);
6. Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan
7. Direksi PT Danareksa (Persero),
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Danareksa (Persero) pada pukul 16.05 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 19 Februari 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Danareksa (Persero) untuk berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), pedoman perilaku (*code of conduct*) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Danareksa (Persero) untuk mengoptimalkan pemasaran dan sosialisasi tentang produk dengan menggunakan teknologi digital sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Danareksa (Persero) untuk dapat saling bersinergi dengan baik antar BUMN dan menjaga iklim kompetisi yang sehat.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Danareksa (Persero) untuk keluar dari zona nyaman, serta lebih kreatif memanfaatkan sumber daya (*resources*) yang ada dan melakukan langkah-langkah strategis agar dapat lebih meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan.
5. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Danareksa (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (*lima*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.

Catatan :

Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan sinkronisasi berbagai program yang ada di Perusahaan BUMN dan Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan rakyat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.35 WIB.

Jakarta, 19 Februari 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.
A-103